

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan kabupaten, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Pada dasarnya, setiap desa mendapatkan Alokasi Dana Desa sesuai dengan porsi masing-masing. Penyaluran Alokasi Dana Desa ini, disalurkan dengan perhitungan dimana berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula yang meliputi jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis. Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud nyata pemenuhan Otonomi Desa, agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokrasi, serta pemberdayaan masyarakat. Sedangkan maksud pemberian Dana Alokasi Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulasi atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan

masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan/transparan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik.

Desa-desa di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau juga merupakan desa yang memperoleh Alokasi Dana Desa sebagai penunjang sektor pemerintahan desa agar terwujud kesejahteraan di masing-masing desa tersebut. Jumlah desa yang ada di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Data Desa Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau
Tahun 2021

No	Nama Desa	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk
1	Balai Ingin	7.540	2.377
2	Beginjan	486.700	2.048
3	Cempedak	42.000	2.294
4	Emberas	8.500	1.574
5	Kawat	2.500	2.721
6	Sungai Jaman	1.045	3.230
7	Melugai	54,8	1.450
8	Pulau Tayan Utara	140	2.497
9	Pedalaman	6.700	4.654
10	Sebemban	2.393	913
11	Sejotang	6.200	2.259
12	Lalang	160,62	1.678
13	Subah	18.156	2.271
14	Tanjung Bunut	7.540	2.124
15	Tebang Benua	2.586	1.544
Jumlah		592.215,42	33.634

Sumber : Kantor Camat Tayan Hilir, 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, 5 (lima) desa terluas di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau adalah Beginjan, Cempedak, Subah, Emberas, dan Balai Ingin dan Tanjung Bunut. Sedangkan, 5 (lima) desa dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Pedalaman, Sungai Jaman, Kawat, Balai Ingin, dan Cempedak. Besarnya nilai alokasi dana desa dan persentase realisasi penggunaan alokasi dana tersebut yang disalurkan kepada 5 (lima) desa pada Tahun 2021 dengan jumlah penduduk terbanyak dapat dilihat pada Tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Alokasi Dana Desa dan Realisasi
Berdasarkan Jumlah Penduduk Terbanyak
Di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau
Tahun 2021

No	Nama Desa	Alokasi Dana (Rp)	Realiasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Pedalaman	Rp570.179.920,00	Rp. 535.969.124,00	94
2	Sungai Jaman	Rp564.850.422,00	Rp. 474.474.354,00	84
3	Kawat	Rp555.446.217,00	Rp. 511.010.519,00	92
4	Balai Ingin	Rp495.142.594,00	Rp. 445.628.334,00	90
5	Cempedak	Rp490.502.912,00	Rp. 470.882.795,00	96

Sumber : Kantor Camat Tayan Hilir, 2021

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa pada Tahun 2021 desa Pedalaman merupakan desa dengan nilai alokasi dana desa terbesar yaitu sebesar Rp. 570.179.920,00 dengan realisasi penggunaan dana sebesar 94 persen. Namun, dari kelima desa tersebut, desa Sungai Jaman merupakan desa dengan nilai realisasi terendah yaitu 84 persen dari nilai alokasi dana desa yang diberikan. Jumlah penduduk merupakan faktor di dalam penentuan nilai alokasi dana desa yang diberikan berdasarkan alokasi formula, kelima desa di atas, merupakan desa dengan penduduk terbanyak di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau.

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas politik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah memiliki tujuan pokok yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintah juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial seperti

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau diperoleh informasi bahwa permasalahan yang seringkali muncul terkait pengelolaan alokasi dana desa berkaitan dengan ketidakjelasan penyaluran dana desa sehingga masyarakat tidak merasakan adanya perkembangan desa yang berarti. Selain itu, akuntabilitas dalam penyampaian pelaporan pengelolaan dana desa yang tidak dilakukan secara periodik sehingga masyarakat tidak mengetahui alur kas pengeluaran dari dana desa yang digunakan.

Guna menghindari kecurangan saat proses pengelolaan ADD, semua lapisan melalui aparat yang berwenang hingga masyarakat harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya sikap apatis dan menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban. Konsep dasar akuntabilitas di dasarkan pada klasifikasi respontabilitas manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu tiap jajaran aparatatur bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilakukan pada bidangnya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dengan yang tidak terkendali. Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang dapat dikendalikan dan dipertanggungjawabkan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti kegiatan tersebut adalah kegiatan yang terencana dan terlaksana dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Pemerintah desa sebagai representasi sektor publik harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menetapkan asas-asas pemerintahan yang baik seperti transparansi dan akuntabilitas yang merupakan wujud penyampaian pertanggungjawaban dari pemerintah

kepada masyarakat. Akuntabilitas juga berisi informasi kinerja yang dapat dimanfaatkan dan dianalisis untuk pengambilan keputusan atau melakukan perubahan kebijakan-kebijakan yang dianggap kurang tepat, selain itu akuntabilitas dan transparansi juga dapat digunakan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal yang dipaparkan di atas, maka penulis ingin melakukan sebuah penelitian lebih jauh mengenai alokasi dana desa di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau dengan judul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau”.

1.2. Rumusan Masalah

2.1.1. Pernyataan Masalah

Dalam alokasi dana desa yang terjadi di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau, masyarakat merasa kurangnya transparansi di dalam pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana. Selain itu, penggunaan dana desa tidak dicatat dan dilaporkan secara periodik, sehingga akuntabilitas laporan pengelolaan dana desa di desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau juga belum terlaksana dengan baik.

2.1.1. Pertanyaan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah paparkan diatas, maka pertanyaan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana transparansi alokasi dana desa di desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau ?
2. Bagaimana akuntabilitas alokasi dana desa di desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis transparansi alokasi dana desa di desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau.
2. Untuk menganalisis akuntabilitas alokasi dana desa di desa Sungai Jaman Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau.

1.4. Kontribusi Penelitian

2.1.1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan informasi tentang penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan teori-teori yang sudah ada sebelumnya.

2.1.1. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berupa koreksi penerapan transparansi dan akuntabilitas alokasi dana desa khususnya kepada pemerintah daerah di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya agar dapat dijadikan sebagai pembanding dalam pemikiran dan penelitian lebih lanjut.